

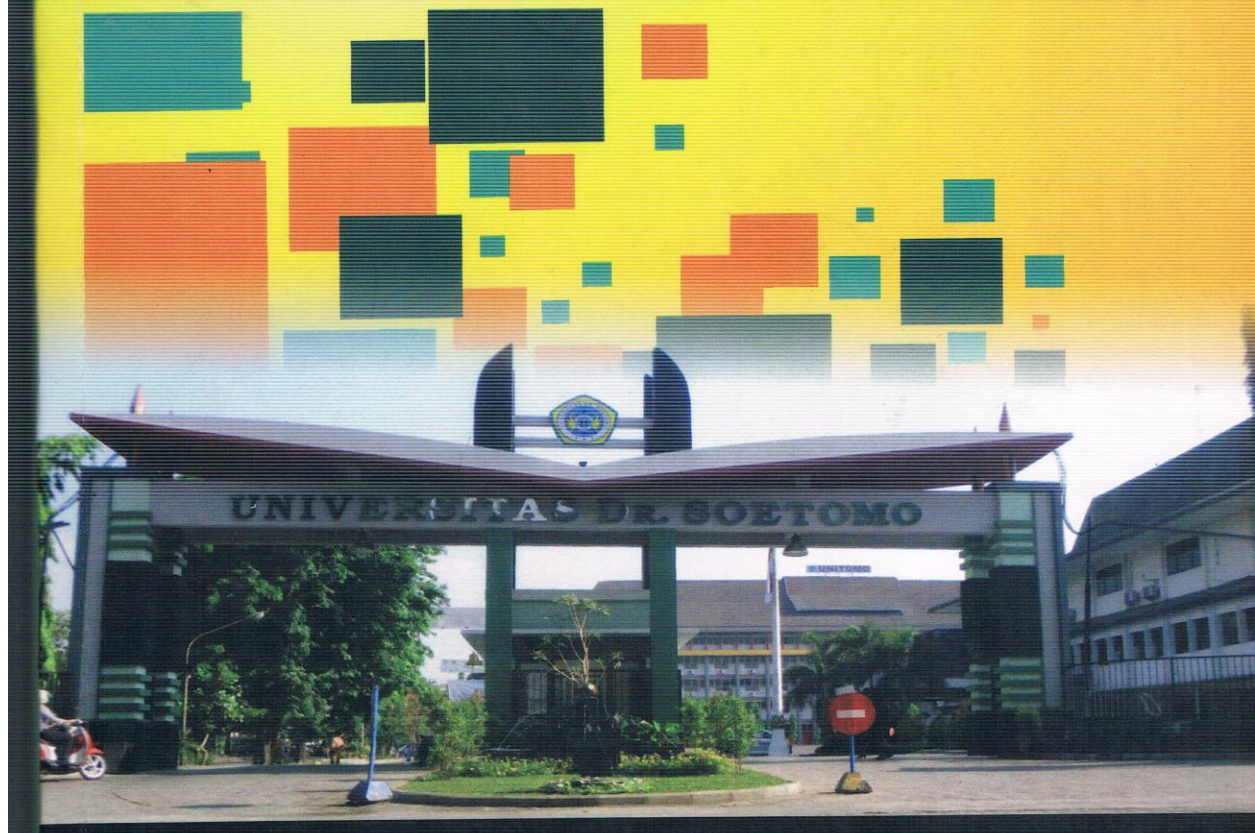


UNIVERSITAS DR. SOETOMO
Cerdas | Berbudi | Berprestasi



PROCEEDING **SEMINAR NASIONAL**

LOCAL WISDOM ENTREPRENEURSHIP
Surabaya, 24 Oktober 2012



**SEMINAR NASIONAL DAN PROCEEDING UNIVERSITAS DR
SOETOMO SURABAYA 2012**

"LOCAL WISDOM ENTREPRENEURSHIP".

@ Hak cipta dilindungi Undang-undang

Diterbitkan pertama oleh:
Universitas Dr. Soetomo Surabaya

ISBN 978-602-17013-0-0



**Sanksi Pelanggaran Pasal 22
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002
Tentang Hak Cipta:**

Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat(1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat (satu) bulan dan/ atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratusjuta rupiah).

PENGEMBANGAN PENATAAN ASOSIASI USAHA LOKAL NON KORPORATIS PRODUK MAKANAN OLAHAN GUNA MENINGKATKAN PEREKONOMIAN URBAN COMMUNITY

Fedianty Augustinah, Dra, MM
Fakultas Ilmu Administrasi-Jurusan
Administrasi Bisnis
Universitas DR. Soetomo Surabaya
Email : fedi_august@yahoo.co.id
fediaugust@gmail

ABSTRAKSI

Dalam rangka mendukung upaya penanggulangan kemiskinan dan kesenjangan, dilakukan penyediaan dukungan dan kemudahan untuk pengembangan usaha ekonomi produktif berskala mikro/informal, terutama di kalangan keluarga miskin dan/atau di daerah pinggiran perkotaan yang menjadi kantong-kantong kemiskinan. Asosiasi local usaha produk makanan olahan merupakan salah satu usaha untuk mengentaskan kemiskinan dimana yang diteliti sebanyak 30 kelompok asosiasi local (Aslok) di Kota Surabaya Bagian Timur.

Kata Kunci: Usaha Ekonomi Produktif, Asosiasi Usaha Lokal, *Urban Community*

I. PENDAHULUAN

Dalam rangka mendukung upaya penanggulangan kemiskinan dan kesenjangan, dilakukan penyediaan dukungan dan kemudahan untuk pengembangan usaha ekonomi produktif

berskala mikro/informal, terutama di kalangan keluarga miskin dan/atau di daerah pinggiran perkotaan yang menjadi kantong-kantong kemiskinan. Pengembangan usaha skala mikro tersebut diarahkan untuk meningkatkan kapasitas usaha dan keterampilan pengelolaan usaha, serta sekaligus meningkatkan kepastian dan perlindungan usahanya, sehingga menjadi unit usaha yang lebih mandiri, berkelanjutan dan siap untuk tumbuh dan bersaing. Asosiasi local diharapkan akan menjadi penghubung dan pemberi masukan bagi pemerintah di Kota Surabaya sebagai acuan dalam mengembangkan kebijakan maupun melahirkan kebijakan dan perlindungan masyarakat setempat.

Pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan Koperasi merupakan langkah yang strategis dalam meningkatkan dan memperkuat dasar kehidupan perekonomian dari sebagian terbesar rakyat Indonesia, *khususnya melalui penyediaan lapangan kerja dan mengurangi kesenjangan dan tingkat kemiskinan*. Dengan demikian upaya untuk memberdayakan UMKM harus terencana, sistematis dan menyeluruh baik pada tataran makro, meso dan mikro yang meliputi (1) penciptaan iklim usaha dalam rangka membuka kesempatan berusaha seluas-luasnya, serta menjamin kepastian usaha disertai adanya efisiensi ekonomi; (2) pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM untuk meningkatkan akses

kepada sumber daya produktif sehingga dapat memanfaatkan kesempatan yang terbuka dan potensi sumber daya, terutama sumber daya lokal yang tersedia; (3) pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil dan menengah (UKM); dan (4) pemberdayaan usaha skala mikro untuk meningkatkan pendapatan masyarakat yang bergerak dalam kegiatan usaha ekonomi di sektor *informal yang berskala usaha mikro*,

lembaga swadaya masyarakat dan gerakan-gerakan social memiliki potensi untuk mempengaruhi para elit dalam struktur pemerintahan. Munculnya kelompok-kelompok asosiasi member perlindungan padaberbagai kepentingan yang dengan demikian mengarah pada semakin luasnya basis social kepentingan local.

Dengan merujuk pernyataan tersebut diatas *adanya kelompok asosiasi local yang akan*

Aktivitas Usaha		Kecamatan			
		Sukolilo	Gubeng	Mulyorejo	Jumlah kelompok
1.	Usaha pentol gorengan	3	2	2	7
2.	Usaha nasi dan mie goreng	2	2	2	6
3.	Usaha bakso	2	2	1	5
4.	Usaha ikan bakar	1	1	3	4
5.	Usaha makanan kecil / kudapan	4	2	2	8

terutama

yang masih berstatus keluarga miskin. Selain itu, peningkatan kualitas koperasi untuk berkembang secara sehat sesuai dengan jati dirinya dan membangun efisiensi kolektif terutama bagi pengusaha mikro dan kecil. Pentingnya asosiasi-asosiasi lokal yang dimaksudkan (Rulland , 1993) yang dikutip oleh Trikartono (2001) dalam Jurnal Otonomi Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Kelompok-kelompok tersebut dapat menyediakan keahlian, informasi, data, layanan-layanan, keuangan dan sumber-sumber daya organisasional kepada pemerintah local.
2. Kelompok-kelompok tersebut memberikan kemungkinan yang lebih luas bagi partisipasi politik pada tingkat lokal. Kelompok-kelompok yang secara politik aktif, kelompok-kelompok kepentingan, lembaga-

diteliti berfokus pada usaha penjualan berbagai macam produk makanan olahan di perkotaan khususnya Kota Surabaya Bagian Timur yang menjadi wilayah penelitian yaitu Kecamatan Sukolilo, Kecamatan Gubeng dan Kecamatan Mulyorejo.

Tabel. 1. Profil Asosiasi Lokal NonKorporatis Produk Makanan Olahan

Sumber : Hasil survey peneliti di lokasi penelitian

Dari tabel tersebut diatas setiap kelompok / asosiasi local terdiri dari 3 sampai 5 orang anggotanya. Asosiasi usaha produk makanan olahan yang diteliti sebanyak 30 kelompok asosiasi local (Aslok).

II. TINJAUAN PUSTAKA

Sementara, Esman dan Uphoff (1984) dan Uphoff (1992) mengklasifikasikan kelembagaan lokal dalam beberapa kategori,

yaitu: administrasi lokal; pemerintah lokal; organisasi (baca: kelembagaan) yang beranggotakan masyarakat lokal, kerjasama usaha, pelayanan dan bisnis swasta yang dapat diintegrasikan ke dalam pasar baik lokal, regional dan global.

2.1. Pengertian Asosiasi Lokal

Dalam Jurnal Pendidikan dan Monitoring Pembangunan Otonomi Daerah (tahun 2000) yang diterbitkan oleh Lembaga Pengkajian dan Pengembangan OTODA dan Kerjasama antar Wilayah dengan Universitas Indonesia (FISIP) yang mengelompok asosiasi local (Aslok) kedalam dua kategori :

1. Korporatis, yang dapat dimasukkan dalam jenis korporatis adalah Aslok yang memiliki kriteria berikut :
 - a. Pengurus dipilih / ditunjuk oleh pemerintah.
 - b. Program-program kegiatan Aslok sebagian besar ditentukan oleh pemerintah
 - c. Pendanaan untuk melakukan kegiatan didukung sepenuhnya oleh pemerintah
 - d. Adanya pegewasan dan pembinaan langsung dari pemerintah.
 - e. Kepentingan yang diwakili adalah kepentingan pemerintah.
 - f. Kurang berakar pada masyarakat.

Aslok- Aslok yang termasuk dalam pengelompokan ini adalah : Himpunan Kelompok Tani Indonesia, Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD), dan

serikat-serikat pekerja yang disahkan oleh pemerintah.

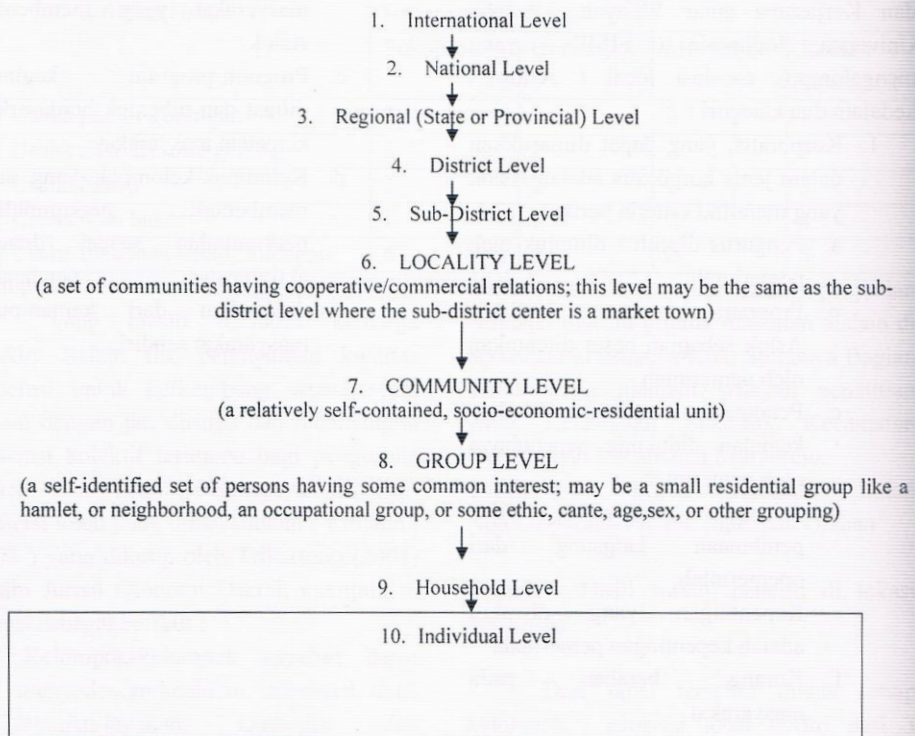
2. Non-korporatis, yang dapat dikelompok dalam jenis nonkorporatis adalah Aslok-Aslok yang memiliki kriteria sebagai berikut :
 - a. Dibentuk berdasarkan kepentingan masyarakat tanpa ada campur tangan pemerintah.
 - b. Pengurus ditentukan oleh masyarakat yang membentuk Aslok.
 - c. Program-program kegiatan dibuat dan dibentuk berdasarkan kemauan masyarakat.
 - d. Kelompok-kelompok yang sifat membentuk perkumpulan-perkumpulan sesuai dengan aktivitasnya, pendanaan didasarkan dari kemampuan masyarakat sendiri.

2.2. Kelembagaan Lokal

Pengertian Lokal sebagai satu tingkatan (*local level*) sering disamakan dengan tingkatan masyarakat (*community level*). Dalam kasus ini terminologi kelembagaan lokal dikaitkan dengan tingkatan aktivitas dan pengambilan keputusan sebagaimana yang disusun oleh Uphoff (1986).

perbedaan yang muncul sudah menyangkut kewenangan dan unit pengambilan keputusan serta aktivitas yang terlibat relative besar. Lembaga-lembaga lokal di sini dimaksudkan mencakup lembaga pemerintah (*public sector*) maupun lembaga swasta (*privat sector*), yang aktivitasnya dihubungkan oleh *intermediate sector*,

Gambar. 1. LEVEL OF DECISION MAKING AND ACTIVITY



Sumber: Wibowo, Agung, P. P., 1993:31

Sebagaimana digambarkan di atas, maka apa yang disebut sebagai tingkatan lokal adalah sekurang-kurangnya mencakup tiga tingkatan- angka 6, 7, dan 8 yang barangkali setingkat kecamatan ke bawah. Di atas itu, tidak cukup lokal karena

kemasyarakatan. Esman & Uphoff (dalam Uphoff, 1986) mengklasifikasi enam kategori utama dari lembaga lokal, yaitu (Wibowo, Agung, P. P., 1993:32):

- (a) *Local Administration*, yaitu instansi-
- (b) instansi di daerah yang merupakan aparat departemen pemerintah pusat,

yang bertanggung jawab kepada atasan langsung (*accountable to bureaucratic superiors*)

- (c) *Local Government*, yaitu badan-badan perwakilan atau disetujui yang memiliki kewenangan untuk menangani tugas-tugas pembangunan dan pengaturan, yang bertanggung jawab kepada pemerintah daerah (*accountable to loc; residents*);

- (d) *Membership Organizations*, merupakan *local self-help associations* yang anggotanya menangan:

i. Berbagai macam tugas (*multi tasks*), seperti perkumpulan pembangunan daerah atau komite pembangunan desa (LKMD, PKK, dan sebagainya)

ii. Tugas-tugas khusus (*Specific tasks*), seperti perkumpulan pemakai air (P3A, Klompencapir, KTH, dan lain-lain)

iii. Kebutuhan-kebutuhan anggota yang memiliki karakteristik atau kepentingan yang sama, seperti kelompok arisan ibu-ibu, perkumpulan pengajian, dsb)

- (e) *Cooperative*, yaitu semacam organisasi lokal yang sumberdaya ekonomi anggotanya untuk memperoleh keuntungan, seperti koperasi pasar dsb.

- (f) *Service Organizations*, yaitu organisasi lokal yang dibentuk terutama untuk memberikan bantuan kepada orang-orang yang bukan

anggotanya, seperti lembaga palang merah Indonesia.

- (g) *Private Businesses*, yaitu cabang-cabang atau kelompok pelaksana independen dari perusahaan ekstra-lokal yang bergerak di sektor pabrik, jasa, ataupun perdagangan.

2.3. Pengertian Kebijakan

Beberapa pendapat memberikan definisi yang berbeda, tetapi dalam implikasinya adalah sama, bahwa kebijaksanaan itu harus mempunyai tujuan dan hasil dari tindakan yang diusulkan oleh seseorang atau kelompok Berbagai pendapat tersebut antar lain : Harold D. Iasswell dan Abraham Kaplan memberi arti kebijaksanaan sebagai a projected program of goals, values and a practice (suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktek-praktek yang terarah). Carl J Frederick mendefinisikan kebijakan sebagai berikut : “ ...a proposed course of action of person, group, or government within a given environment providing abstrcles and oportunities wich the policy was proposed to utilize and overcome in an effort to reach a goal or realize an objective or a purpose “ (serangkaian tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatan kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu).

Pengertian berikutnya dikemukakan oleh James E Anderson bahwa kebijaksanaan itu adalah : “ A purposive course of action followed by an actor or set of actor in dealing with a problem or matter of concern “ (serangkaian tindakan yang mempunyai

tujuan tertentu yaang diikuti dan dilaksanakan oleh pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu). Dan berkaitan dengan definisi tersebut apa yang telah dikemukakan diatas dari James Anderson juga mengatakan bahwa “ public polices are those polices developed by govermental bidies and officials “ (kebijakan negara adalah kebijaksanaan kebijaksanaan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah) .

Satu konsep yang dekat dengan otonomi daerah adalah “local government”. Menurut Wolman and Goldsmith (1990), Local Government Administration (LGA) adalah: “... the government’s ability to have an independent impact on the welfare of the residents of the local jurisdiction”. Jadi, disini ditekankan kepada perlunya mencapai kemampuan dan kemandirian masyarakat. Sedikit lebih luas, Boyne (1996) mendefinisikan menjadi: “... powers the ability to innovate, experiment, and develop policies that can vary by jurisdiction”. Selanjutnya, Kirlin (1996) merubah “government” menjadi “governance”, dan mendefinisikannya sebagai “... capacity as the ability to make and carry through collective choices for a geographically defined group of people”. Pada definisi Kirlin terlihat perlunya keterlibatan masyarakat setempat. Kemampuan pemerintah terbentuk melalui dukungan institusi-institusi lain seperti aturan yang konstitusional, pemerintah lain yang selevel, lembaga pengadilan, dan infrastruktur kewarganegaraan, yang digambarkan dengan luas meliputi unsur-unsur media massa, asosiasi

kewarganegaraan, dan kelompok-kelompok komunitas (Chapman, 1999).

Dalam sistem apapun, secara prinsip ada tiga bentuk utama yang dapat dilakukan negara kepada warganya. Secara berurutan adalah assistance, cooperation, dan service; tergantung kepada potensi dan kondisi masyarakatnya, terutama kemampuan untuk pemecahan masalah. Dalam assistance, pemerintah menjadi pelaksana (executing and implementing role). Pada cooperation, peran negara dan masyarakat seimbang; sedangkan pada pola service, negara lebih pasif. Otonomi daerah, atau otonomi lokal, merupakan hal yang penting karena mampu memainkan setidaknya tiga peran yaitu: untuk memaksimalkan nilai, sebagai lembaga yang memberi peluang kepada akses rakyat terhadap pemerintah, dan sebagai kompetitor terhadap lembaga lain sehingga kondisi-kondisi efisiensi dapat dicapai. Karena beragamnya persoalan antar wilayah maka tak ada pendekatan yang “one solution fits all” dalam pengembangan kelembagaan. Secara konseptual, otonomi daerah merupakan wadah yang baik untuk berkembangnya civil society dan menjamin berjalannya mekanisme checks and balances antara pemerintah dengan warganya.

2.4. Usaha Makanan Olahan

Dunia usaha merupakan tulang punggung perekonomian nasional maka harus digenjut sedemikian rupa sebagai budaya masyarakat Indonesia. Berwirausaha melibatkan dua unsur pokok yaitu peluang dan kemampuan menanggapi peluang. Kewirausahaan yaitu tanggapan terhadap peluang usaha yang terungkap dalam

seperangkat tindakan serta membuahkan hasil berupa usaha yang melembaga, produktif dan inovatif.

Pangan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia ("BUTSARMAN") yang dapat menentukan kualitas sumberdaya manusia baik dari aspek gizi, kesehatan, produktivitas dan kecerdasan. Pada saat ini permintaan dan konsumsi pangan terus mengalami peningkatan baik dari aspek kualitas, kuantitas dan keanekaragaman pangan. Hal ini merupakan peluang dan sekaligus tantangan yang dihadapi oleh pelaku usaha/produsen termasuk produsen pangan olahan untuk meraih kesempatan dalam mengembangkan usahanya.

Pangan olahan, adalah merupakan hasil dari pengolahan produk primer ataupun produk setengah jadi menjadi produk jadi pada komoditas pertanian yang dimanfaatkan sebagai pangan untuk dikonsumsi manusia. Pangan, adalah produk yang berasal dari komoditas pertanian yang dikonsumsi manusia dan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dalam rangka menentukan kualitas sumberdaya manusia baik dari aspek gizi, kesehatan, produktivitas, maupun kecerdasan

2.5. Masyarakat Perkotaan

Masyarakat perkotaan sering disebut juga *urban community*. Pengertian masyarakat kota lebih ditekankan pada sifat-sifat kehidupannya serta ciri-ciri kehidupannya yang berbeda dengan masyarakat pedesaan. Perhatian khusus masyarakat kota tidak terbatas pada aspek-aspek seperti pakaian, makanan dan perumahan, tetapi mempunyai perhatian lebih luas lagi. Orang-orang kota sudah memandang penggunaan kebutuhan

hidup, artinya oleh hanya sekadarnya atau apa adanya. Hal ini disebabkan oleh karena pandangan warga kota sekitarnya. Kalau menghidangkan makanan misalnya, yang diutamakan adalah bahwa yang menghidangkannya mempunyai kedudukan sosial yang tinggi. Pada orang kota, makanan yang dihidangkan harus kelihatan mewah dan tempat penghidangannya juga harus mewah dan terhormat. Di sini terlihat perbedaan penilaian. Orang desa memandang makanan sebagai suatu alat memenuhi kebutuhan biologis, sedangkan pada orang kota, makanan sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan sosial.

III. METODOLOGI

3.1. Pendekatan Penelitian.

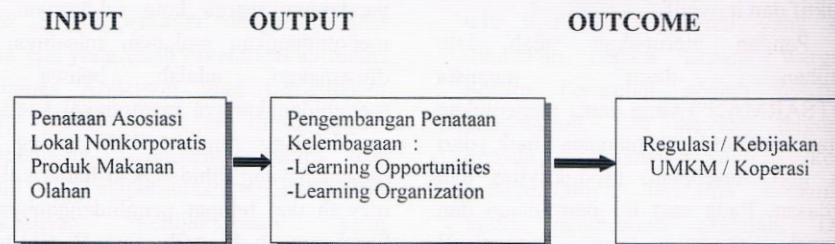
Dalam menentukan metode (cara) meneliti karakter atau perilaku manusia dengan berbagai aktivitas atau kegemaran yang dimiliki, maka peneliti tidak menentukan populasi atau sampel, namun dengan menentukan subjek atau sasaran penelitian. Ada pendapat yang mengatakan bahwa penelitian kualitatif tidak setuju dengan menggunakan sampel yang berkonotasi jumlah dan menggantikannya dengan "subjek atau sasaran penelitian" (Patton, 1990).

3.2. Subjek/Sasaran penelitian .

Yang menjadi subjek atau sasaran penelitian adalah kelompok atau asosiasi non-korporatis yang terdiri dari :

1. Kelompok usaha pentol gorengan
2. Kelompok usaha nasi dan mie goreng
3. Kelompok usaha bakso
4. Kelompok usaha ikan bakar

5. Kelompok usaha makanan kecil / kudapan



Gambar 2. Kerangka Konseptual Penelitian

3.3. Metode Pengumpulan Data.

Untuk mengumpulkan data kualitatif dapat diukur secara tidak langsung seperti ketrampilan, aktivitas, sikap, maka cara yang digunakan untuk mengumpulkan bukti bukti empiris, berupa wawancara berstruktur dan mendalam, FGD (Forum Group Discussion), serta pengumpulan dokumen. Yang perlu diingat bahwa dalam penelitian kualitatif cenderung terbuka dan bersifat fleksibel atau luwes agar dapat focus pada masalah yang dihadapi (Sarantakos, 1993). Gambaran ini menunjukkan perkembangan metode pengumpulam data bagi data kualitatif khususnya dalam perilaku atau aktivitas manusia yang mempunyai karakteristik atau perilaku yang beda-beda (Poerwandari, 20001).

3.4. Jenis Penelitian.

Jenis penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah Eksploratif artinya peneliti ingin menjelajahi atau menyelidiki dan mencari situasi dan aktivitas aktivitas yang dilakukan, dan mempunyai sifat terbuka fleksibel yang bisa dimengerti oleh kelompok atau individu dengan problematik baru (Marzuki, 2005).

3.5. Kerangka Konseptual.

Untuk memudahkan peneliti dalam menganalisa .maka peneliti perlu membangun kerangka atau bingkai-bingkai dalam menganalisa mengembangkan kebijakan-kebijakan penataan kelembagaan . Kerangka ini sebagai alat atau model dalam menjelaskan keluaran (Output) dan Outcome (hasil).

Menurut Lundberg (Dale, 2003) menyatakan bahwa pembelajaran adalah "suatu kegiatan bertujuan yang diarahkan pada pemerolehan dan pengembangan keterampilan dan pengetahuan serta aplikasinya". • Menurut Sandra Kerka (1995) yang paling konseptual dari learning organization adalah asumsi bahwa 'belajar itu penting', berkelanjutan, dan lebih efektif ketika dibagikan dan bahwa setiap pengalaman adalah suatu kesempatan untuk belajar Berdasarkan hasil penelitian Tjakraatmaja (2002) dihasilkan temuan bahwa untuk membangun learning organization dibutuhkan tiga pilar yang saling mendukung, yaitu : 1. Pembelajaran Individual (individual learning), 2. Jalur Transformasi

Pengetahuan, 3. Pembelajaran Organisasional (organizational learning).

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti yang digali dari para anggota usaha produk makanan olahan yang terdiri dari melalui berbagai pengumpulan data, menurut pengamatan peneliti karakteristik yang dimiliki oleh asosiasi usaha produk makanan olahan diantaranya sebagai berikut :

1. Umumnya mereka dari kalangan masyarakat yang tidak mampu secara ekonomis / miskin
2. Usaha yang dilakukannyamerupakan suatu manifestasi yang bertujuan untuk mencari kesempatan kerja dan pendapatan untuk kebutuhan hidup
3. Hampir sebagian besar orang yang melakukan usaha penjualan produk makanan olahan ketrampilan relative rendah
4. Pendidikan yang dimiliki oleh sebagian besar berpendidikan rendah.

Adapun hasil dari penelitian yang didapatkan dan telah diolah oleh peneliti yaitu sebagai berikut :

1. Penataan Asosiasi Produk Makanan Olahan

Subjek atau sasaran penelitian adalah kelompok atau asosiasi non-korporatis yang terdiri dari kelompok / asosiasi usaha pentol gorengan, usaha nasi dan mie goreng, usaha bakso, usaha ikan bakar, usaha makanan kecil / kudapan melalui hasil wawancara terstruktur dan mendalam yaitu :

Tabel. 2. Indikator Penataan Asosiasi Produk Makanan Olahan

No	Indikator Penataan Asosiasi	Jawaban kelompok	
		Ya	Tidak
1	Dalam menata kelompok / asosiasi berdasarkan kepentingan masyarakat / asosiasi produk makanan olahan tanpa ada campur tangan pemerintah.	30	-
2	Pengurus ditentukan ditentukan atas kesepakatan para anggota asosiasi usaha produk makanan olahan	30	-
3	Program-program kegiatan dibuat dan dibentuk berdasarkan kemauan masyarakat asosiasi usaha produk makanan olahan	30	-
4	Asosiasi usaha produk makanan olahan membentuk perkumpulan-perkumpulan sesuai dengan aktivitas/kegiatannya , pendanaan dalam asosiasi usaha yang dibentuk didasarkan dari kemampuan masyarakat asosiasi usaha itu sendiri	30	-

Sumber : Data dari Aslok usaha produk makanan olahan

Dalam penataan asosiasi usaha produk makanan olahan yang dilakukan bahwa semua asosiasi usaha produk makanan olahan sebanyak 30 aslok (100 %) menyatakan bahwa penataan asosiasi selama ini dilakukan oleh kelompok Aslok itu sendiri.

2. Pengembangan Penataan Kelembagaan Asosiasi Lokal

koperasi simpan pinjam bagi anggota Aslok dan disertai pengaturan pengucuran dana permodalan bagi anggota Aslok.

Lokal sebagai satu tingkatan (*local level*) sering disamakan dengan tingkatan masyarakat (*community level*). Dalam kasus ini terminologi kelembagaan lokal dikaitkan dengan tingkatan aktivitas dan pengambilan keputusan oleh pemerintah melalui lembaga pemerintah seperti level kecamatan. Hasil akhir yang diharapkan oleh Aslok usaha produk makanan olahan bahwa menginginkan dibuatnya regulasi dengan membentuk peraturan koperasi / UMKM bagi mereka (dorongan yang tinggi untuk berubah adalah produk Regulasi/Peraturan usaha produk makanan olahan) sehingga anggota-anggota yang dinaungi oleh aslok usaha produk makanan olahan dapat berkembang dengan baik dan dapat meningkatkan perekonomian bagi mereka.

V.KESIMPULANDAN REKOMENDASI

5.1. Kesimpulan

Strategi pembangunan nasional yang sentralistik (juga di pedesaan, yang dengan selalu menginduk ke pusat), menyebabkan bias mengejar pertumbuhan, bias kawasan atau wilayah, kurang memperhatikan aspek sosial (keadilan) dan budaya (keberlanjutan); merupakan pola pembangunan yang konvensional (Salim, 1991), ternyata menuai kinerja kelembagaan tradisional dan masyarakat lokal yang marginal. Berbagai dampak negatif lanjutannya antara lain seperti: terjadinya kontraksi perekonomian (daerah maupun nasional), degradasi sumberdaya alam

(lahan dan air), terbatasnya kesempatan kerja dan kesempatan berusaha, semakin akutnya kesenjangan antar golongan masyarakat serta memudarnya kelembagaan tradisional (dan ikatan/jaringan sosial masyarakat tradisional), yang pada akhirnya berimplikasi pada lemahnya struktur sosial ekonomi masyarakat.

Pendekatan pembangunan melalui cara pandang kemandirian asosiasi lokal usaha produk makanan olahan mengisyaratkan bahwa semua tahapan dalam proses pemberdayaan harus dilakukan secara terdesentralisasi. Upaya pemberdayaan dengan prinsip sentralisasi, deterministik, dan homogen adalah hal yang sangat dihindari. Karena itu upaya pemberdayaan yang berbasis pada pendekatan desentralisasi akan menumbuhkan kondisi otonom, dimana setiap komponen akan tetap eksis dengan berbagai keragaman (*diversity*) yang dikandungnya. Upaya pemberdayaan yang berciri sentralistik tidak akan mampu memahami karakteristik spesifik tatanan yang ada, dan cenderung akan mengabaikan karakteristik tatanan. Sebaliknya upaya pemberdayaan yang dilakukan secara terdesentralisasi akan mampu mengakomodasikan berbagai keragaman tatanan.

Pemberdayaan (*empowerment*) yang berasal dari kata dasar “*empower*” bermakna sebagai “*to invest with power, especially legal power or official authority*”, atau “*... taking control over their lives, setting their own agendas, gaining skill, building self-confidence, solving problems and developing self-reliance*”. Pemberdayaan dapat dilakukan terhadap individual, kelompok sosial, maupun

Dari penggalan data bahwa pengembangan penataan dalam kelembagaan asosiasi usaha lokal produk makanan olahan yaitu pentol dan gorengan, nasi dan mie goreng, bakso, ikan bakar, dan makanan kecil / kudapan di Kota Surabaya Bagian Timur terutama di wilayah Kecamatan Sukolilo, Mulyorejo dan Gubeng dapat dilihat dari hasil tabel sebagai berikut :

Tabel 3. Indikator Pengembangan Penataan Kelembagaan Aslok

No	Indikator Pengembangan Penataan Kelembagaan Aslok	Ya	Tidak
1	Learning Opportunities : - Pembelajaran Membuat Makanan Olahan Yang Sehat - Pembelajaran Memasarkan Makanan Olahan yang telah dibuat - Pembelajaran pengajuan kredit untuk permodalan	30 30 30	- - -
2	Learning Organization : - Pembelajaran pengelolaan organisasi Aslok usaha produk makanan olahan - Pembelajaran manajemen pengelolaan usaha secara mandiri	29 30	1 -

Sumber : Data dari Aslok usaha produk makanan olahan

Dari indikator pengembangan penataan kelembagaan asosiasi local usaha produk makanan olahan yang menyatakan bahwa hamper semua aslok menginginkan sebuah penataan terhadap kelembagaannya melalui learning opportunities dan learning organization sehingga pihak pemerintah daerah dapat ikut campur dalam membantu mengembangkan usaha yang dikelola. Dan harapan dari anggota Aslok usaha produk makanan olahan bahwa pemerintah dapat memberikan bantuan misalkan dalam bentuk bantuan permodalan sehingga usaha mereka dapat berkembang serta dapat menggeliatkan perekonomian masyarakat terutama masyarakat urban (urban community).

3. Regulasi / Kebijakan

Kebijaksanaan itu harus mempunyai tujuan dan hasil dari tindakan yang diusulkan oleh seseorang atau kelompok Aslok maka hasil dari penelitian tentang keinginan asosiasi usaha produk makanan olahan terhadap aslok-aslok yang telah didirikannya yaitu :

Tabel 4. Indikator tentang Regulasi / Kebijakan

No	Indikator Regulasi	Ya	Tidak
1	Dibentuknya Koperasi untuk simpan pinjam modal bagi Aslok	30	-
2	Peraturan pengucuran dana / modal bagi anggota aslok	30	-

Sumber : Data dari Aslok usaha produk makanan olahan

Dari tabel tersebut diatas bahwa semua Aslok usaha Produk makanan olahan menyatakan setuju adanya regulasi dari pemerintah terutama dapat dibentuknya

terhadap komunitas. Dari sisi paradigma, pemberdayaan lahir sebagai antitesis dari paradigma developmentalis. Dalam Payne (1997), disebutkan bahwa pada intinya pemberdayaan adalah "to help clients gain power of decision and action over their own lives by reducing the effect of social or personal blocks to exercising existing power, by increasing capacity and self confidence to use power and by transferring power from the environment to clients". Pemberdayaan mengupayakan bagaimana individu, kelompok, atau komunitas berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan untuk membentuk masa depan sesuai dengan keinginan mereka. Inti utama dari pemberdayaan adalah tercapainya "kemandirian".

5.2. Rekomendasi

1. Tidak ada satu bentuk kelembagaan khusus untuk pemberdayaan, namun ada elemen-elemen tertentu agar upaya pemberdayaan dapat berhasil. Beberapa kunci dalam pengembangan penataan kelembagaan asosiasi lokal untuk pemberdayaan usaha produk makanan olahan adalah: adanya akses kepada informasi, sikap inklusif dan partisipasi, akuntabilitas, dan pengembangan organisasi lokal terutama usaha produk makanan olahan khususnya masyarakat urban (urban community) Kota Surabaya Bagian Timur.
2. Terdapat dua prinsip dasar yang seyogyanya dianut di dalam proses pemberdayaan pada urban community terutama pada asosiasi lokal produk makanan olahan. Pertama, adalah menciptakan ruang atau peluang bagi masyarakat untuk mengembangkan dirinya secara mandiri dan menurut cara yang dipilihnya sendiri. Kedua, mengupayakan

agar masyarakat memiliki kemampuan untuk memanfaatkan ruang atau peluang yang tercipta tersebut.

Daftar Pustaka

- Bromley, Daniel W. *Economic Interest and Institution, The Conceptual Foundation of Public Policy*, Basil Black-Wall, New-York, 1989.
- Bonus, Holge, *The Cooperative Assosiation as a Bussiness Enterprise*, Journal Institution and Theoretical Economic, 1986.
- Hetherington, John AC. *Mutual Cooperative Enterprise an Analisis of Costumer, Owned Firm in The United State* the University Press, Illinors, 1986.
- Malo, Mannase & Trisnoningtias. *Metode Penelitian Masyarakat*, PAU Universitas Indonesia, 1985.
- Miles, Matthew.B. Milles & Huberman A. Michael. *Analisis Data Kualitatif*, Penerbit Universitas Indonesia, 1992.
- Mudrajat Kuncoro, *Metode Reseach untuk Bisnis dan Ekonomi*, 2003
- Makalah Bappenas : *Percepatan Pembangunan ekonomi Yang Inklusif dan Berkeadilan* Oleh Armida Alisjahbana, 2010
- Poerwandari E Kristi, *Pendekatan Kualitatif Dalam Penelitian Psikologi*, LPSP3 UI, 2001
- Widayati dan Tim, *Hibah Kompetitif : Alternatif Inovasi Mutual, Melalui Pelatihan dan Pengembangan Untuk Menghasilkan Produk Kreatif, Peningkatan Penghasilan (Income Generation) dalam Mendukung Creative Industry*, 2009

Wiranto. Pengembangan Usaha Mikro Dalam Memperkuat Ekonomi Domestik Dalam manajemen Usahawan, 2007.

Jurnal Pendidikan dan Monitoring Pembangunan Otonomi Daerah : Basis asosiasi Lokal Untuk Pembangunan Otonomi Daerah, 2000

Ridwan, Buchari. Metode & Teknik Menulis Tesis, 2004.

Robbin, Coulter. Perilaku Organisasi, 2006.

Sanapiah Faizah, Format-Format Penelitian, 2008

Sarantakos S, Social Reseach Melbourne : Mc Millan Education Australia Pty Ltd, 1993

Sedarmajanti. Organisasi Menghadapi Dinamika Lingkungan, 2000.

Sedarmajanti. Manajemen Sumber Daya Manusia, 2007

- Teori kulumbugan
(principle agent theory)

→ Peran pemerintah

→ Teori agen



Bagaimana peran
magis & aliter ?



KEMENTERIAN KOPERASI DAN
USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS DR. SOETOMO SURABAYA

Kerjasama dengan

KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA



UNIVERSITAS DR. SOETOMO

Sertifikat

Diberikan kepada :

Dra. FEDIANTY AUGUSTINAH, MM

Sebagai

Pemakalah Proceeding

Pada Seminar Nasional dengan Tema "**Local Wisdom Entrepreneurship**"
Diselenggarakan di Kampus Universitas Dr. Soetomo Surabaya
Surabaya, 24 Oktober 2012



Universitas Dr. Soetomo
Rektor,

Dr. H. Ulul Albab, MS.

NPP: 87.01.1.025

Ketua Panitia,



SEMINAR NASIONAL DAN PROCEEDING
UNIVERSITAS DR. SOETOMO
SURABAYA

Dr. Liosten-RR Uily Tampubolon, MM.

NIP: 196111131987032001